

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesenjangan ekonomi atau ketimpangan distribusi pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta kemiskinan atau jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (*poverty line*), kurangnya tingkat pendidikan, kecenderungan dari kenaikan harga-harga secara umum dan terus-menerus, serta bertambahnya pengangguran, yang merupakan faktor terjadinya kemiskinan. Dimana faktor-faktor tersebut saling mempengaruhi dan adanya keterkaitan. Tujuan terpenting dari pembangunan adalah pengurangan kemiskinan, yang dapat dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan atau dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Jadi, terdapat hubungan segitiga antara pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan ketidakmerataan pendapatan merupakan hubungan dua arah. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun upaya tersebut belum menampakkan hasil yang signifikan terhadap jumlah penduduk miskin yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan (BKKBN, 2013).

Masalah kemiskinan belum dapat teratasi secara optimal juga diakibatkan karena faktor penyebab kemiskinan yang beragam dan kompleks. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan bukan hanya faktor ekonomi saja. Dengan melihat

faktor kemiskinan maka dapat diketahui cara untuk meminimalisir kemiskinan tersebut. Beberapa diantaranya adalah produk domestik regional bruto (PDRB), pengangguran, dan modal manusia dapat dilihat dari pendidikan (Chandra, 2010; Mahsunah, 2011; Budhi, 2013; Rusdiarti, 2013; Leasiwal, 2013; Abebe, 2014; Cholili, 2014; Marmujiono; 2014).

TABEL 1.1

Sepuluh Besar Provinsi di Indonesia dengan Jumlah Penduduk Miskin Terbanyak Tahun 2014 (Dalam Ribu Jiwa)

No	Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin
1	Jawa Timur	4.748,42
2	Jawa Tengah	4.561,83
3	Jawa Barat	4.238,96
4	Sumatera Utara	1.360,60
5	Lampung	1.143,93
6	Sumatera Selatan	1.085,80
7	Nusa Tenggara Timur	991,88
8	Aceh	864,11
9	Papua	837,42
10	Nusa Tenggara Barat	816,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2014 (data diolah)

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan. Pada Tabel 1.1 dapat dilihat jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2014 berada pada urutan kedua di Indonesia yakni setelah Provinsi Jawa Timur dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 4.561.830 jiwa. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota. Dalam beberapa aspek terdapat beberapa perbedaan karakteristik antara kabupaten dan kota. Dari aspek luas wilayah, wilayah kabupaten relatif lebih luas daripada kota. Di wilayah kota tidak terdapat desa, hanya dibentuk dari kecamatan dan kelurahan. Sedangkan wilayah kabupaten terdapat kecamatan, kelurahan, dan

desa. Dari aspek sosial dan budaya, penduduk kota memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang lebih baik. Hal ini karena fasilitas publik yang juga lebih baik daripada di kabupaten. Dari aspek perekonomian, rata-rata Pendapatan Domestika Regional Bruto (PDRB) kota juga lebih besar dari kabupaten. Hal ini berimplikasi pada proporsi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Aktivitas ekonomi dan pendapatan di kota juga lebih besar daripada di kabupaten (PP No. 38/2007).

Perbedaan antara kabupaten dan kota dalam beberapa aspek di atas dapat berpengaruh terhadap banyaknya jumlah penduduk miskin. Salah satunya yang terdapat di wilayah kabupaten/kota se-karesidenan Surakarta.

Tabel 1.2
Jumlah Kemiskinan Se-Karesidenan Surakarta Tahun 2010-2017
(Ribuan Jiwa)

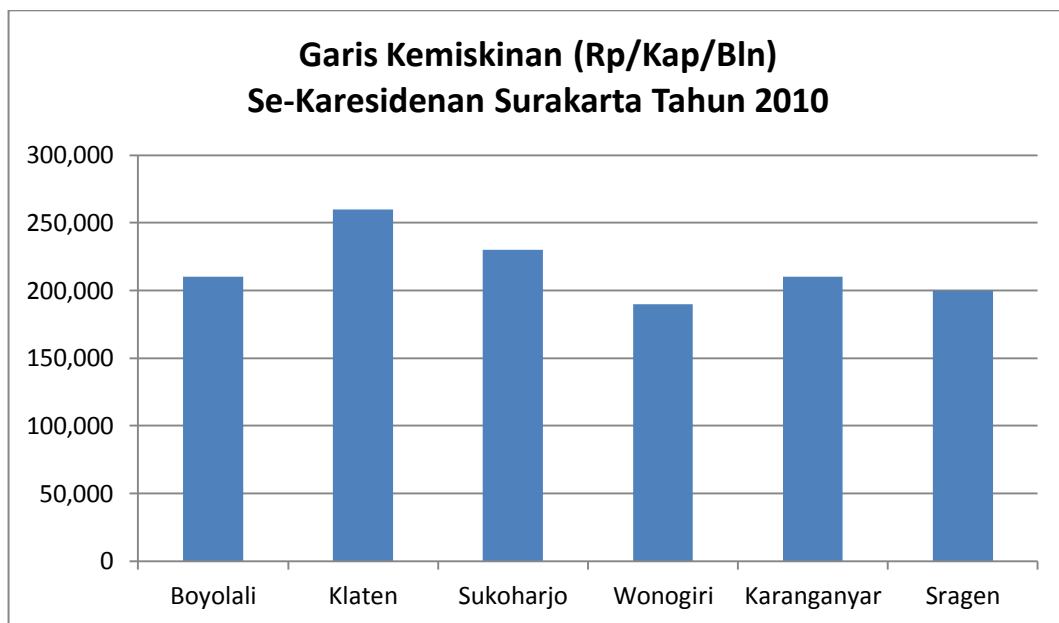
WILAYAH	JUMLAH KEMISKINAN							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
BOYOLALI	127.80	139.50	129.10	126.50	118.60	120.00	117.00	116.40
KLATEN	197.40	203.10	187.90	179.50	168.20	172.30	168.00	165.00
SUKOHARJO	90.20	92.00	85.10	84.10	78.90	79.90	78.90	76.70
WONOGIRI	145.50	146.40	135.40	132.20	123.80	123.00	124.00	123.00
KARANGANYAR	113.80	124.50	115.20	114.40	107.30	106.40	107.70	106.80
SRAGEN	149.70	154.30	142.80	139.00	130.30	130.40	126.80	124.00
SURAKARTA	69.80	64.50	59.70	59.70	55.90	55.70	55.90	54.90

Sumber: Dokumen SPKD Provinsi Jawa Tengah

Tabel 1.2 menunjukkan jumlah kemiskinan di Karesidenan Surakarta tahun 2010-2017, selama tahun 2010-2017 dari ketujuh wilayah di Karesidenan Surakarta jumlah kemiskinan tertinggi berada di kabupaten Klaten dengan jumlah kemiskinan di tahun 2011 203,10 jiwa, dan di tahun 2017 turun sampai dengan 165,00 juta jiwa. Sedangkan jumlah kemiskinan terendah diduduki kota Surakarta dengan jumlah kemiskinan di tahun 2009 77,97 juta jiwa, dan di tahun 2017

jumlah kemiskinan di Surakarta 54,90 juta jiwa. Kabupaten Boyolali, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sragen jumlah kemiskinnannya saling beriringan. Kabupaten Sukoharjo jumlah kemiskinan di tahun 2010-2017 cukup rendah dengan jumlah kemiskinan di tahun 2010 90,20 juta jiwa, dan di tahun 2017 sejumlah 76,70 juta jiwa. Tinggi rendahnya tingkat pendidikan di wilayah tersebut, lapangan pekerjaan yang tersedia, angka kelahiran yang tinggi dan lain sebagainya.

Gambar 1.1
Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln) Se-Karesidenan Surakarta



Sumber: Dokumen SPKD Provinsi Jawa Tengah

Gambar 1.1 menunjukkan garis kemiskinan di Karesidenan Surakarta tahun 2010, dimana garis kemiskinan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori rendah, kategori sedang dan kategori tinggi. Kota Surakarta berada di kategori garis kemiskinan paling tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya. Garis kemiskinan tinggi ditentukan dengan nilai berada diatas garis kemiskinan

Nasional (bulan Maret 2010 sebesar Rp. 211.726,00/ kapita / bulan). Sedangkan untuk garis kemiskinan terendah berada di wilayah Wonogiri. Meskipun di wilayah lain garis kemiskinan belum terlalu tinggi dibandingkan dengan kota Surakarta, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa akan bertambah jumlah kemiskinan di daerah tersebut seiring dengan berjalannya waktu.

Maka dari itu, perlu adanya peran pemerintah dalam mengontrol tingkat kemiskinan di Eks Karesidenan Surakarta, sehingga jumlah kemiskinan dapat diminimumkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara, diadakannya pelatihan kerja dan ketrampilan di masyarakat, menambah atau membuka lapangan kerja baru, memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya sebuah pendidikan, sehingga dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Dengan begitu pengangguran dapat teratasi, sehingga jumlah kemiskinan dapat dikendalikan, secara langsung tercapailah hidup yang sejahtera di masyarakat.

Menurut Widodo (2006) Pembangunan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah usaha pemerintah/pihak-pihak terkait yang bersifat multidimensional yang meliputi perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk struktur sosial, sikap masyarakat, dan institusi nasional tanpa mengesampingkan tujuan awal yaitu pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja.

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi suatu negara adalah tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan sasaran meningkatnya persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat, meningkatnya taraf hidup yang ditandai dengan peningkatan pendapatan masyarakat sehingga tidak ada kesenjangan

dalam pendapatan diberbagai daerah, tersedianya lapangan kerja yang banyak sehingga dapat meminimumkan jumlah pengangguran, pemerataan pendidikan, dan memperluas jangkauan pilihan ekonomi dan sosial.

Pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengertian yang berbeda. Pembangunan ekonomi (*economic development*) diartikan sebagai suatu proses perubahan terus-menerus menuju ke arah perbaikan di berbagai bidang ekonomi, yang diikuti dengan perubahan-perubahan dalam struktur dan corak kegiatan ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) adalah suatu proses kenaikan *output* (produksi) dalam jangka waktu panjang.

Pertumbuhan ekonomi hanyalah satu dari beberapa aspek dari pembangunan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi sendiri hanya membahas seputaran nilai *output* agregat yang meningkat dari waktu ke waktu khususnya output agregat per kapita. Pembangunan ekonomi suatu negara tidak akan terlaksana apabila tidak ditunjang dengan adanya pertumbuhan ekonomi namun perlu digaris bawahi bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu bukan satu-satunya cara dalam mewujudkan pembangunan ekonomi. Namun aspek lain seperti pendidikan, moral, etos kerja, politik, keamanan, dan lain-lain dapat mempengaruhi keberhasilan dalam upaya dalam terlaksananya pembangunan ekonomi suatu negara.

Kuncoro (2001) menyatakan bahwa pendekatan pembangunan tradisional lebih dimaknai sebagai pembangunan yang lebih memfokuskan pada peningkatan PDRB suatu provinsi, kabupaten, atau kota. Sedangkan pertumbuhan ekonomi

dapat dilihat dari pertumbuhan angka PDRB. Saat ini umumnya PDRB baru dihitung berdasarkan dua pendekatan, yaitu dari sisi sektoral/lapangan usaha dan dari sisi penggunaan. Selanjutnya PDRB juga dihitung berdasarkan harga berlaku dan harga konstan. Total PDRB menunjukkan jumlah seluruh nilai tambah yang dihasilkan oleh penduduk dalam periode tertentu.

Pengangguran dapat diartikan sebagai suatu ukuran yang dilakukan apabila seseorang tidak memiliki suatu pekerjaan, namun mereka berusaha secara aktif untuk mencari pekerjaan. Pengangguran dapat dikatakan sebagai suatu kondisi di mana seseorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan suatu pekerjaan namun mereka belum juga mendapatkan pekerjaan tersebut (Sukirno, 1997). Pengangguran sendiri tercipta oleh ketidakseimbangan pada pasar tenaga kerja. Dimana jumlah tenaga kerja yang ditawarkan oleh pencari kerja lebih besar daripada jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan.

Pendidikan merupakan salah satu modal dasar manusia yang harus dipenuhi untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Todaro, 2006). Peningkatan kualitas SDM juga bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan tingkat penduduk yang tamatan minimal SLTA lebih besar ketimbang tamatan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat menunjukkan bahwa masih banyak penduduk tamatan SLTA yang tidak melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa belum maksimalnya penyerapan angkatan kerja penduduk pendidikan minimal SLTA di Sulawesi Utara. Sehingga banyak pencari kerja terdidik (pengangguran terdidik) yang belum terserap di pasar tenaga kerja di Sulawesi Utara. Permasalahan ini akan berakibat pada

lambatnya proses pertumbuhan dan pembangunan di Sulawesi Utara. Hal ini bukan saja karena pendidikan akan berpengaruh terhadap produktivitas, tetapi juga akan berpengaruh terhadap fertilitas masyarakat. Pendidikan dapat menjadikan sumber daya manusia lebih cepat mengerti dan siap dalam menghadapi perubahan dan pembangunan suatu Negara. Pemerintah mempunyai peran aktif dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agar SDM yang dihasilkan dapat menjadi sumber untuk pembangunan negara maupun daerah dan salah satu usaha pemerintah untuk memajukan pendidikan yaitu dengan mencanangkan program wajib belajar sembilan tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana arah dan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta tahun 2010-2017?
2. Bagaimana arah dan besaran jumlah pengangguran terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta tahun 2010-2017?
3. Bagaimana arah dan besaran tingkat pendidikan terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta tahun 2010-2017?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis arah dan besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta tahun 2010-2017.
2. Untuk menganalisis arah dan besarnya jumlah pengangguran terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten/Kota Se-Karesidenan tahun 2010-2017.
3. Untuk menganalisis arah dan besarnya tingkat pendidikan terhadap jumlah kemiskinan di Kabupaten/Kota Se-Karesidenan Surakarta tahun 2010-2017.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan khususnya dalam hal kemiskinan dan faktor-faktor lain yang berhubungan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai literature ataupun referensi bagi peneliti-peneliti yang melakukan penelitian sejenis.
3. Bagi Pemerintah di Karesidenan Surakarta, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan khususnya dalam pengambilan kebijakan terutama dalam hal kemiskinan.

E. Model dan Alat Analisis

Dalam penelitian ini alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi data panel. Dimana data panel merupakan gabungan dari data deret waktu (*time*

series) mulai tahun 2010 – 2017 dan data silang tempat (*cross section*) berjumlah 7 Kabupaten/ Kota di Karesidenan Surakarta yang menghasilkan sebanyak 56 observasi. Model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut¹:

$$TKM_{it} = \alpha + \beta_1 PDRB_{it} + \beta_2 JM_{it} + \beta_3 TP_{it} + u_{it}$$

Keterangan:

- TKM_{it} : Jumlah Kemiskinan untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t
PDRB_{it} : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t
JM : Tingkat Pengangguran untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t
TP_{it} : Tingkat Pendidikan untuk wilayah ke-i dan waktu ke-t
i : Menunjukkan Kab/Kota di Karesidenan Surakarta
t : Menunjukkan deret waktu 2010-2017
α : Koefisien intersep dan slope
β : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing
u : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima Bab, yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Landasan Teori, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Analisis Data dan Pembahasan, dan Bab V Penutup.

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini memuat perihal latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, model dan alat analisis dan sistematika penulisan.

¹ Modifikasi dari jurnal Romas Yossia Tambunsaribu dan Bagio Mudakir. “Analisis Pengaruh Produktivitas Tenaga Kerja, Upah Riil, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di 35 Kabupaten/ Kota Jawa Tengah”. *Diponegoro Journal Of Economics*. Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, Halaman 1. Model panel lihat Gujarati, Damodar N dan Dawn C. Porter. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Edisi 2 (Jakarta: Salemba Empat. 2012). 235-269.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini memuat perihal teori-teori yang berbubungan dengan kemiskinan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, tinjauan terhadap penelitian terdahulu, dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Dalam bab ini memuat perihal model dan alat analisis, analisis regresi dan data dan sumber data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan

Dalam bab ini memuat perihal pemaparan penggarapan data dengan data panel, analisis data dan interpretasi ekonomi.

Bab V Penutup

Dalam bab ini memuat perihal kesimpulan dan saran melalui penelitian yang dilakukan, daftar pustaka berisi sumber-sumber dari pustaka acuan yang digunakan dalam penelitian, dan lampiran memuat input variabel dan hasil-hasil regresi.